



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Jalan Raya Jabon Nomor 190, Mojokerto, Jawa Timur 61364
Tlp. (0321) 332868 Faks. (0321) 332868
Laman <http://disperka.mojokertokab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 188/ 19/416-117/2025
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN MOJOKERTO

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN MOJOKERTO,

- Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 23. Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2026, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tentang Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerton Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Permebdagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

- Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 ;
 9. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto;
 10. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 23 Tahun 2025 Tentang RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2026;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- Kesatu : Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 sebagaimana terlampir dalam lampiran I.
- Kedua : Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menjadi pedoman Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mojokerto

Pada tanggal : 4 Agustus 2025

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN KABUPATEN MOJOKERTO**



RENCANA KERJA 2026
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN MOJOKERTO



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DISPERKA) Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Disperka Tahun 2025-2029. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 ini terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun Lalu, Tujuan dan capaian Renstra OPD, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD, Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Rencana Kerja (Renja) sebagai dokumen perencanaan OPD yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Disperka Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui rencana kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerjanya.



Mojokerto, Agustus 2025
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Noerhono, S Sos, MM
Pembina Utama Muda/IVC
NIP 19721008 199201 1 001

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI..... i

DAFTAR TABELiv

BAB I PENDAHULUAN.....1

 1.1 Latar Belakang1

 1.2 Landasan Hukum2

 1.3 Maksud dan Tujuan6

 1.4 Sistematika Penulisan6

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALUError!

 Bookmark not defined.

 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah10

 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....17

 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah19

 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD19

 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....28

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH29

 3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional29

 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah30

 3.3 Program dan Kegiatan.....32

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH41

BAB V PENUTUP42

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.....10

Tabel 2.2.....18

Tabel 2.3.....20

Tabel 2.4.....28

Tabel 3.1.....32

Tabel 3.235

Tabel 4.1.....42

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2026 merupakan dokumen resmi daerah yang diperuntukkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya. Sebagai sebuah dokumen resmi, Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah. Renja Perangkat Daerah disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) perangkat daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan sebagai dasar pengusulan program / kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.

Selain itu Rencana Kerja Perangkat Daerah ini mempunyai fungsi penting yang mendasar dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja Perangkat Daerah berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah daerah. Kualitas penyusunan Renja Perangkat Daerah akan sangat menentukan kualitas pelayanan Perangkat Daerah yang diberikan kepada masyarakat pengguna.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 dilatarbelakangi dengan adanya UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto terintegrasi dengan prioritas dan fokus pembangunan daerah Tahun 2026, bersinergi dengan prioritas pembangunan nasional maupun Provinsi Jawa Timur.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah kabupaten Mojokerto dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto merupakan perangkat daerah yang menjadi unsur pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang Perpustakaan dan Kearsipan yang dipimpin oleh kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Mojokerto.

Sebagai dokumen rencana tahunan, Renja PD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja PD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) PD sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan PD untuk memasukkan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2026.
3. Renja PD merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan PD untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2026.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham) Tahun 2021-2025;
16. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender ;
17. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
18. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender ;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan inventarisasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
28. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045.
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi dan tata kerja Perangkat daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 6);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerton Tahun 2019 Nomor 4) ;

34. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Darah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 1);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2025–2045.
36. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2025–2029.
37. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto.
38. Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto Nomor 188.4/21/416-117/2024 tanggal 16 Desember 2024 tentang Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Tahun 2025 pada Dinas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2026 dimaksudkan agar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto mampu menjawab tuntutan lingkungan yang berkenaan dengan pelayanan Bidang Perpustakaan, Bidang Kearsipan dan Bidang Pengembangan.

Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai arah dan pedoman bagi upaya penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Mojokerto di bidang Perpustakaan dan kearsipan, sehingga para pelaksana dan pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pembangunan daerah sehingga pembangunan di Kabupaten Mojokerto sesuai dengan perencanaan, serta dapat berhasil sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto Tahun 2026, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

1.1 Latar belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang renja PD, keterkaitan antara renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra PD, Renja K/L, dan Renja Propinsi/Kabupaten/Kota serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan APBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja PD.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PD serta susunan garis besar isi.

Bab II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun lalu (Tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan PD

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi yang masing-masing PD serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.

Subbab ini berisi uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD.
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional/global, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals).
4. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan PD, dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindakluti dalam perumusan program prioritas tahun rencana.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Subbab ini berikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan.
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya : terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD atau program kegiatan yang cocok namun besarnya berbeda.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat.

Bab III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja PD, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan sebagaimana dimaksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

Subbab ini berisi perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD.

3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2026

Berisikan penjelasan mengenai :

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal: Pencapaian visi dan misi kepala daerah, pencapaian MDGs, Pengentasan kemiskinan, pencapaian SPM, pendayagunaan potensi ekonomi daerah, pengembangan daerah terisolir.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan yang meliputi :
 - Jumlah program, jumlah kegiatan dan Jumlah Sub Kegiatan
 - Sifat penyebaran lokasi program, Kegiatan dan Sub kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu.

Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi rumusan rencana program, kegiatan, sub Kegiatan dan pagu dana indikatif yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto pada Tahun Anggaran 2026 serta prakiraan maju Tahun Anggaran 2027.

Bab V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Anggaran yang tersedia untuk setiap Perangkat Daerah pada setiap tahun anggaran dilakukan evaluasi antara anggaran dengan realisasi, dengan memperhatikan unsur ekonomis, efektif, dan efisien. Ekonomis diukur dengan masukan (*input*) anggaran dengan realisasi, sedangkan efisiensi dengan cara membandingkan antara *input* dengan *output*, dan efektifitas dengan cara membandingkan hasil (*outcome*) dengan target yang ditetapkan. Adapun ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto per tanggal 31 Desember 2024 sebesar 87,02 % sebagai berikut:

Anggaran sebelum Perubahan APBD	Rp. 4.338.248.400
Rasionalisasi APBD	<u>Rp. 62.302.000</u>
Anggaran setelah Perubahan	Rp. 4.275.946.400
Realisasi	<u>Rp. 3.721.114.348</u>
Sisa Lebih/(Kurang) Anggaran	<u>Rp. 554.832.052</u>

Sedangkan anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto pada Tahun Anggaran 2025 sebelum Efisiensi adalah sebesar **Rp. 5.245.510.400,-** (Lima Milyar dua ratus empat puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah) sedangkan setelah efisiensi sebesar **Rp. 5.224.179.200** (Lima Milyar dua ratus dua puluh empat ribu seratus tujuh puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah). Atau berkurang sebesar Rp. 21.330.800,-

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto sampai dengan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1
(Tabel TC. 29 pada Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024

NAMA : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN MOJOKERTO

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg sd Tahun (N-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja PD n-1)	Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra PD sd Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja PD Tahun (N-2)	Realisasi Renja PD Th (n-2)	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Prog dan Keg sd Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11
2.23.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,02	80,91	82,72 (A)	82,75 (A)	100,03%	82,80 (A)	82,75 (A)	100,04%
2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah									
2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen					2 Dokumen		
2.23.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan					7 Laporan		
2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90%	90%	90,5%	91,59%	101,2%	91,60%	91,60%	100%
2.23.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 bulan	100%	30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	100%
2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan	90%	90%	90%	90%	100%	-	-	-

2.23.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 bulan	12 bulan	1 paket	1 paket	100%	1 Paket	1 paket	100%
2.23.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 bulan	12 bulan	1 paket	1 paket	100%			
2.23.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12 bulan	12 bulan	1 Paket	1 paket	100%			
2.23.01.2.06.07	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	12 bulan	12 bulan	1 Paket	1 paket	100%			
2.23.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan	50 Laporan		100%	50 Laporan		
2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan	12 bulan	12 bulan	86%					
2.23.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 bulan	12 bulan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
2.23.01.2.08.09	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 bulan	12 bulan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi baik	12 bulan	12 bulan	90%					
2.23.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	Jumlah Kendaraan Dinas atau Operasional yang dipelihara dan	12 bulan	12 bulan	10 Unit	10 Unit	100%	10 Unit	10 Unit	100%

	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	dibayarkan Pajak dan Perizinannya								
2.23.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi	12 bulan	12 bulan	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%
2.23.01.2.09.10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	12 bulan	12 bulan	1 Unit	1 Unit	100%	1 unit	1 unit	100%
2.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan	1. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	11	12,138	13,5	72,12	534,22%	72,15	72,15	100%
		2. Indeks Kegemaran Membaca	40,5	63,94	67	66,6	99,40%	67	67	100%
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Perpustakaan Tingkat Kabupaten yang dikelola	1.1000 Eks 2. 100 Orang 3.20 Eks		1.250 Eks 2. 100 Orang 3.20 Eks	1. 398 Eks 2. 350 Orang 3. 20Eks				
2.23.02.2.01.03	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	20 Eksemplar	18 Eksemplar	20 Eksemplar	20 Eksemplar	100%	25 Eksemplar	25 Eksemplar	100%
2.23.02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten / Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang dilakukan Pembinaan dalam mewujudkan Standart Nasional Perpustakaan	100 Orang	111 Orang	100 Orang	350 Orang	111%	100 Perpustakaan		
2.23.02.2.01.08	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang dicetak dan diadakan	1000 Eksemplar	623 eksemplar	250 Eksemplar	213 Eksemplar	62,3%	500 Eksemplar		

2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca	15 kali	12 kali	3 Kali	3 kali	100%			
2.23.02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar			75 Lokus		100%	75 Lokus		
2.23.02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	240 Orang	240 Orang	1 Perpustakaan	-		1 perpustakaan	1 perpustakaan	
2.24.02	Program Pengelolaan Arsip	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan Akuntabilitas Kinerja	50%	133,%	50%	133,7%	267,4%			
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah PD yang sudah mengelola Arsip Dinamis sesuai aturan	5 OPD	5 OPD	5 OPD	5 OPD	100%			
2.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	5 OPD	6 OPD	5 OPD	6 OPD	120%	250 Berkas		
2.24.02.2.01.02	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Keenangan Kabupaten/Kota	5 OPD	6 OPD	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah PD yang sudah menyerahkan Arsip Statis ke Lembaga Kearsipan Daerah	5 OPD	9 OPD	5 OPD	1 OPD	20%			
2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah arsip Statis yang dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses arsip Statis	250 berkas	177 berkas	250 berkas	250 berkas	100%	250 arsip		
2.24.03	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip	53%	60%	53%	60%				

		sebagai bahan Pertanggungjawaban								
2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah Produk Hukum yang Ditetapkan	3 Peraturan	5 Peraturan	3 peraturan	3 peraturan	100%	3 Peratur an	3 Peratur an	
2.24.03.2.01.03	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun			250 Arsip	250 Arsip	100%	250 Arsip	250 Arsip	100%

Pada Tahun 2026 Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah,

Pada tahun anggaran 2024, didukung dengan anggaran yang bersumber dari APBD sebesar **Rp. 4.275.946.400,-** dan yang harus dipertanggung jawabkan secara akuntabel. Jumlah anggaran dan Realisasi Tahun 2024, terbagi ke dalam rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	SILPA
1.	BELANJA OPERASI	4.216.626.812	3.670.428.848	87,05	546.197.964
	a. Belanja pegawai	3.857.174.000	3.373.400.826	87,46	483.773.174
	b. Belanja Barang dan Jasa	359.452.812	297.028.022	82,63	62.424.790
2.	BELANJA MODAL	59.319.588	50.685.500	85,44	8.634.088
	a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.025.506	38.685.500	84,05	7.340.006
	c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13.294.082	12.000.000	90,27	1.294.082
Total		4.275.946.400	3.721.114.348	87,02	554.832.052

Jumlah Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta realisasi pada Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	SILPA
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.157.946.400	3.608.248.622	86,57	549.697.778
1.	Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.437.600	4.068.100	74,81	1.369.500
a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.837.600	2.155.200	75,95	682.400

b.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.600.000	1.912.900	73,57	687.100
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.838.734.000	3.354.971.006	87,40	483.762.994
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.838.734.000	3.354.971.006	87,40	483.762.994
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	81.379.904	65.882.900	79,75	15.497.004
a.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000	40.945.500	81,89	9.054.500
b.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	0	0	0	0
c.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.879.904	3.225.300	66,09	1.654.604
d.	Penyediaan Bahan/Material	20.000.000	15.389.500	76,95	4.610.500
e.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.500.000	6.322.600	97,27	177.400
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	156.194.896	120.580.319	77,19	35.614.577
a.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	106.932.496	73.165.439	68,42	33.767.057
b.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	49.262.400	47.414.880	96,25	1.847.520
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	76.200.000	62.746.297	82,34	13.453.703
a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.700.000	34.426.961	75,33	11.273.039
b.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.500.000	11.587.236	92,70	912.764
c.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18.000.000	16.732.100	92,96	1.267.900
II.	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	65.000.000	61.164.746	94,09	3.835.254
1.	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	40.000.000	36.988.146	92,47	3.011.854
a.	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000	9.475.000	94,75	525.000
b.	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar nasional Perpustakaan	10.000.000	9.997.646	99,98	2.354
c.	Pengembangan bahan Pustaka	20.000.000	17.515.500	87,58	2.484.500
2.	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000	24.176.600	96,70	823.400
a.	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	10.000.000	9.900.000	99,00	100.000
b.	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	15.000.000	14.276.600	95,18	723.400
III.	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	40.500.000	39.969.400	98,68	530.600
1.	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	28.000.000	27.638.700	98,70	361.300
a.	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	18.000.000	17.727.700	98,49	272.300
b.	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000	9.911.000	99,11	89.000
2.	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	12.500.000	12.330.700	98,65	169.300
a.	Akuisisi, Pengeolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	12.500.000	12.330.700	98,65	169.300
IV.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	12.500.000	11.731.580	93,85	768.420
1.	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi D bawah 10 (sepuluh) Tahun	12.500.000	11.731.580	93,85	768.420
a.	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	12.500.000	11.731.580	93,85	768.420
Total		4.275.946.400	3.721.114.348	87,02	554.832.052

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat daerah Kabupaten Mojokerto Juncto Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto, menyatakan bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan di bidang perpustakaan dan bidang Kearsipan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Perpustakaan dan Bidang Kearsipan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya;

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam Rencana Strategis DISPERKA Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Urusan Kearsipan

- a. Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional

Yang meliputi : Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip, Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip, persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik, persentase arsip yang dimasukkan dalam SIKN.

Arsip aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.

Arsip inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.

Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya dan

berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau Lembaga kearsipan.

Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) adalah sistem informasi arsip secara nasional yang dikelola oleh ANRI yang menggunakan sarana JIKN.

Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) adalah sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan arsip secara nasional yang dikelola oleh ANRI.

- b. Tingkat Keberadaan dan Keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Yang meliputi : tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK, tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK, tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK, tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK, tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK, tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK

2. Urusan Perpustakaan

- a. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)

Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM) yang meliputi :

UPLM 1 = Pemerataan layanan perpustakaan

UPLM 2 = Ketercukupan koleksi

UPLM 3 = Ketercukupan tenaga perpustakaan

UPLM 4 = Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan

UPLM 5 = Perpustakaan ber-SNP

UPLM 6 = Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan

UPLM 7 = Anggota perpustakaan

Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dapat diambil dari Kajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional.

b. Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (TGM)

Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat dengan mengukur sejumlah variabel utama seperti : frekuensi membaca per minggu, lama membaca per hari dan jumlah buku yang ditamatkan dalam jangka waktu 3 bulan, frekuensi akses internet dan durasi akses internet.

Kinerja pelayanan yang dicapai Disperka Kabupaten Mojokerto dapat dilihat pada Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Disperka Kabupaten Mojokerto.

Tabel 2.2
(Tabel T-C. 30 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN MOJOKERTO

N O	INDIKATOR	SPM/Stan dar Nasional	IKK (PP- 06/08)	TARGET RENSTRA SKPD						REALISASI CAPAIAN						CATATAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	I. Indikator Kinerja Kunci (PP-06/08)															
	Urusan Kearsipan															
1.	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan Akuntabilitas Kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban Nasional			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %							
2.	Tingkat Keberadaan dan keutuhan Arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %							
	Urusan Perpustakaan															
3.	Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (TGM)			67,1	67,2	67,3	67,4	67,5	67,6							
4.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)			72,25	72,35	72,45	72,55	72,65	72,75							

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan selama lima tahun periode pemerintahan kepala daerah mengingat dampaknya yang signifikan bagi masyarakat Kabupaten Mojokerto di masa yang akan datang. Isu-isu tersebut jika tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, demikian pula sebaliknya jika tidak dimanfaatkan akan dapat menghilangkan peluang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto tidak akan dapat terlepas dari permasalahan dan isu yang berkembang secara dinamis dalam pengembangan Perpustakaan dan Kearsipan di tingkat pusat, propinsi dan kabupaten/kota. Permasalahan dan isu yang berkembang dengan perumusan kebijakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang terkait dengan urusan Perpustakaan dan Kearsipan diantaranya adalah:

1. Urusan Perpustakaan
 - a. Tingkat Kegemaran Membaca (TGM)
 - b. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)
2. Urusan Kearsipan
 - a. Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan Akuntabilitas Kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban Nasional.
 - b. Tingkat Keberadaan dan keutuhan Arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto pada TA. 2026 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3
(Tabel T-C. 31 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun Anggaran 2026
Kabupaten Mojokerto

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No.	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Keg./Sub Keg.	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Keg./Sub Keg.	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Mojokerto	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,80	4.279.478.400	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Mojokerto	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,80	4.279.478.400	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90 %	4.019.900.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90 %	3.837.836.000	
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Mojokerto	Jumlah Orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	25 orang/bulan	4.019.900.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Mojokerto	Jumlah Orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	25 orang/bulan	3.837.836.000	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	90 %	137.500.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	90 %	111.705.800	

Rencana Kerja 2026 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Mojokerto

5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Mojokerto	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 paket	75.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Mojokerto	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 paket	50.000.000	
6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Mojokerto	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket	15.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Mojokerto	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket	21.950.000	
7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Mojokerto	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1 paket	7.500.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Mojokerto	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1 paket	5.939.000	
8	Penyediaan Bahan / Material	Kab. Mojokerto	Jumlah paket bahan material yang disediakan	1 paket	25.000.000	Penyediaan Bahan / Material	Kab. Mojokerto	Jumlah paket bahan material yang disediakan	1 paket	24.816.800	
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Mojokerto	Jumlah laporan penyeleng Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	15.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Mojokerto	Jumlah laporan penyeleng Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	9.000.000	
10	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Mojokerto	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan	90 %	156.194.896	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Mojokerto	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan	90 %	189.525.000	
11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air	12 laporan	106.932.496	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air	12 laporan	140.262.600	

			dan Listrik yang disediakan					dan Listrik yang disediakan			
12	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Mojokerto	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor yang disediakan	12 laporan	49.262.400	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Mojokerto	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor yang disediakan	12 laporan	49.262.400	
13	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Mojokerto	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	90%	85.700.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Mojokerto	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	90%	85.700.000	
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Mojokerto	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	10 unit	45.700.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Mojokerto	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	10 unit	50.700.000	
15	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Mojokerto	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	3 unit	20.000.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Mojokerto	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	3 unit	15.000.000	
16	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Mojokerto	Jumlah sarana prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang	1 unit	20.000.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Kab. Mojokerto	Jumlah sarana prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang	1 unit	20.000.000	

			dipelihara/ direhabilitasi			atau Bangunan Lainnya		dipelihara/ direhabilitasi			
17	Program Pembinaan Perpustakaan	Kab. Mojokert o	IPLM(Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat)	72,35	845.000.000	Program Pembinaan Perpustakaan	Kab. Mojokert o	IPLM(Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat)	72,45	65.000.000	
			TGM (Tingkat Kegemaran Membaca)	67,2				TGM (Tingkat Kegemaran Membaca)	67,3		
18	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Mojokert o	Jumlah Perpustakaan Tingkat Kabupaten yang dikelola	2 Perpusta kaan	330.000.000	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Mojokert o	Jumlah Perpustakaan Tingkat Kabupaten yang dikelola	2 Perpust akaan	20.000.000	
19	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten / Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Kab. Mojokert o	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang dilakukan Pembinaan dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	50 Perpustak aan	15.000.000	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten / Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Kab. Mojokert o	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang dilakukan Pembinaan dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	50 Perpustak aan	10.000.000	
20	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Kab. Mojokert o	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan	1 Dokumen	112.500.000	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Kab. Mojokert o	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan	1 Dokumen	112.500.000	

20	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Mojokerto	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Daerah Tingkat daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	20 eksemplar	200.000.000	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Mojokerto	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Daerah Tingkat daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	20 eksemplar	200.000.000	
20	Pengembangan dan Pemeliharaan Perpustakaan Elektronik	Kab. Mojokerto	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	1 Perpustakaan	2.500.000	Pengembangan dan Pemeliharaan Perpustakaan Elektronik	Kab. Mojokerto	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	1 Perpustakaan	2.500.000	
21	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Mojokerto	Jumlah Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca	75 kali	45.000.000	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Mojokerto	Jumlah Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca	75 kali	45.000.000	
22	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Kab. Mojokerto	Jumlah layanan Perpustakaan berbasis inklusi social di seluruh wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	1 Perpustakaan	45.000.000	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Kab. Mojokerto	Jumlah layanan Perpustakaan berbasis inklusi social di seluruh wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	1 Perpustakaan	45.000.000	
22	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di tempat-tempat Umum yang menjadi	Kab. Mojokerto	Jumlah Sarana Perpustakaan yang dibangun dan dipelihara di tempat-tempat Umum yang menjadi	1 Perpustakaan	35.000.000	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di tempat-tempat Umum yang menjadi	Kab. Mojokerto	Jumlah Sarana Perpustakaan yang dibangun dan dipelihara di tempat-tempat Umum yang menjadi	1 Perpustakaan	35.000.000	

	Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
22	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Kab. Mojokerto	Jumlah Orang yang mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten/Kota	600 Orang	245.000.000	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Kab. Mojokerto	Jumlah Orang yang mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten/Kota	600 Orang	245.000.000	
23	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Kab. Mojokerto	Jumlah locus Pembudayaan Kegemaran membaca dan literasi pada satuan pendidikan	100 Locus	190.000.000	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Kab. Mojokerto	Jumlah locus Pembudayaan Kegemaran membaca dan literasi pada satuan Pendidikan	100 Locus	190.000.000	
24	Program Pengelolaan Arsip	Kab. Mojokerto	Tingkat ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas Kinerja	100%	130.000.000	Program Pengelolaan Arsip	Kab. Mojokerto	Tingkat ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas Kinerja	100%	130.000.000	
25	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Mojokerto	Jumlah PD yang sudah mengelola arsip dinamis sesuai aturan	56 OPD	50.000.000	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Mojokerto	Jumlah PD yang sudah mengelola arsip dinamis sesuai aturan	56 OPD	50.000.000	
26	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Kab. Mojokerto	Jumlah Naskah Dinas yang dilakukan	2000 berkas	30.000.000	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Kab. Mojokerto	Jumlah Naskah Dinas yang dilakukan	2000 berkas	30.000.000	

			pemeliharaan dan penyusutan					pemeliharaan dan penyusutan			
27	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Mojokerto	Jumlah laporan hasil	1 Laporan	20.000.000	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Mojokerto	Jumlah laporan hasil	1 Laporan	20.000.000	
28	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Mojokerto	Jumlah PD yang sudah menyerahkan arsip statis ke Lembaga Kearsipan Daerah	5 OPD	80.000.000	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Mojokerto	Jumlah PD yang sudah menyerahkan arsip statis ke Lembaga Kearsipan Daerah	5 OPD	80.000.000	
29	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Kab. Mojokerto	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan akuisisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis	200 Arsip	80.000.000	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Kab. Mojokerto	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan akuisisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis	2000 Arsip	80.000.000	
30	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Kab. Mojokerto	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	100%	20.000.000	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Kab. Mojokerto	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	100%	20.000.000	
31	Pemusnahan Arsip di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Kab. Mojokerto	Jumlah Arsip yang dimusnahkan	500 Arsip	20.000.000	Pemusnahan Arsip di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota yang Memiliki	Kab. Mojokerto	Jumlah Arsip yang dimusnahkan	500 Arsip	20.000.000	

						Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun					
32	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Kab. Mojokerto	Jumlah Arsip yang dilakukan penilaian, penetapan dan pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) tahun	2000 berkas	20.000.000	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Kab. Mojokerto	Jumlah Arsip yang dilakukan penilaian, penetapan dan pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) tahun	2000 berkas	20.000.000	
TOTAL					5.394.294.896	TOTAL					

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 membutuhkan adanya usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Perangkat Daerah, LSM, asosiasi, Perguruan Tinggi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Mojokerto. Program/kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto yang telah diperoleh melalui mekanisme usulan dan penelitian dalam Musrenbang. Selanjutnya dari hasil penelitian dan usulan tersebut diverifikasi terlebih dahulu bersama dengan Bappeda Kabupaten Mojokerto, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto dan pihak pemangku kepentingan.

Tabel 2.4
(Tabel T-C. 32 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan TA. 2026
Kabupaten Mojokerto

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No.	Program/Keg.	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	NIHIL				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Rencana program dan kegiatan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DISPERKA) Kabupaten Mojokerto didasarkan pada pencapaian prioritas Nasional, Renstra Perpustakaan Nasional, Renstra Arsip Nasional, Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Propinsi Jawa Timur, RPJMD/RPJPD, Renstra Disperka Kabupaten Mojokerto dan peraturan perundang-undangan diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Oleh karena itu dalam pelaksanaan pembangunan di sektor Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto didasarkan pada kebijakan nasional terangkum dalam Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Disperka Kabupaten Mojokerto dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kebijakan Bidang Perpustakaan

- a. Pengembangan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial;
- b. Pengembangan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
- c. Pengembangan perpustakaan menjadi pusat belajar, berkegiatan, berketerampilan, berkreasi dan berekreasi;
- d. Pembinaan semua jenis perpustakaan dalam upaya pengembangan, peningkatan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan perpustakaan;
- e. Meningkatkan kerjasama dengan stakeholder dalam rangka sinergi kegiatan yang mendukung untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat;
- f. Meningkatkan dan mengembangkan koleksi perpustakaan termasuk pelestarian koleksi lokal Kabupaten Mojokerto;

2. Kebijakan Bidang Kearsipan

- a. Membangun sistem kearsipan yang komprehensif pada semua instansi guna menciptakan akuntabilitas tata kelola kearsipan;
- b. Menyusun pedoman kearsipan dalam bentuk regulasi tata kelola kearsipan;

- c. Pengembangan sistem kearsipan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menuju sistem kearsipan digital;
- d. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan tata kelola kearsipan;
- e. Optimalisasi akuisisi, perbaikan dan alih media arsip yang bernilai guna dari semua instansi;
- f. Meningkatkan pelayanan, sosialisasi dan pembinaan kearsipan

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah adalah penjabaran atau implementasi dari Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 2025 – 2029, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Adapun tujuan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto adalah Peningkatan Kinerja layanan Pemerintah Daerah

Pernyataan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih untuk 5 tahun ke depan yang menjadi visi pembangunan Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk periode 2025 – 2029 adalah :

“TERWUJUDNYA KABUPATEN MOJOKERTO YANG LEBIH MAJU, ADIL DAN MAKMUR”

Makna “LEBIH” yang dimaksud dalam visi pembangunan ini adalah mengandung semangat dan usaha untuk mencapai pembangunan 5 tahun kedepan lebih baik dari kondisi sebelumnya karena sebagai bagian dari petahana tidak sekedar melanjutkan tetapi dengan SEMANGAT PERUBAHAN kami berupaya agar Kabupaten Mojokerto lebih baik pada masa pengabdian 5 tahun kedepan. Semangat dan usaha itu bisa dilaksanakan secara kolaboratif (bareng-bareng) dengan mengerahkan seluruh daya, upaya, tenaga, fikiran secara total melalui karya-karya nyata, kerja-kerja konkrit untuk Bersama-sama seluruh komponen masyarakat Kabupaten Mojokerto dengan Motto **ÄYO BARENG GUS BARRA DAN Dr. RIZAL BERSAMA MEMBANGUN KABUPATEN MOJOKERTO YANG LEBIH MAJU, ADIL DAN MAKMUR.**

Makna “Lebih Maju” dimaksudkan pencapaian kondisi sosial ekonomi baik makro maupun mikro yang lebih baik sehingga mampu berdaya saing sampai pada tingkatan global.

Makna “Lebih Adil” dalam visi pembangunan ini adalah pemerataan peran yang berorientasi pada penyediaan kesempatan yang berimbang baik sebagai

obyek maupun sebagai subyek pembangunan serta pemerataan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan dalam rangka terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Makna “Lebih Makmur” merupakan sebuah keinginan untuk lebih bisa mencukupi kebutuhan masyarakat Kabupaten Mojokerto baik bidang Pendidikan, kesehatan, social, infrastruktur maupun penyediaan sarana prasarana pemerintahan.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang diukur dengan jelas, terintegrasi, terkoordinasi dan konsisten yang akan dicapai dalam kurun waktu 2025 – 2029. Sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto adalah Peningkatan Kinerja layanan Pemerintah Daerah.

Tujuan dan Sasaran Renja PD disusun berdasarkan misi pembangunan Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang tertuang dalam RPJMD tahun 2025-2029 yang kita kenal dengan CATUR ABHIPRAYA MUBAROK (empat Keinginan kuat yang diberkahi) sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Mewujudkan SDM yang Tangguh, cerdas, trampil, produktif dan berkarakter melalui peningkatan kualitas Pendidikan dan kesehatan serta menjaga ketentraman masyarakat.
3. Membangun kemandirian ekonomi pada semua tingkatan, koperasi dan UM (Usaha Mikro) serta BUMDesa yang berbasis Masyarakat guna mewujudkan keluarga yang sejahtera.
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan di semua sector untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pelayanan public dan mendukung akses social, budaya dan pelestarian lingkungan.

Dari keempat misi tersebut, misi yang erat kaitannya dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah **misi Kesatu** (Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik).

Selanjutnya pada tabel dibawah ini digambarkan secara jelas tujuan dan sasaran serta indikator-indikator sebagai ukuran kinerja pencapaian dari masing-masing sasaran dan tujuan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renja
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Target	
				2025	2026
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	88,80%	89%
2.		Meningkatnya Literasi Masyarakat dan Meningkatkan Mutu Penyelenggaraan Kearsipan	Nilai IKM Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan	88,80%	89%
3.		Meningkatnya kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,80	83

3.3 Program dan Kegiatan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2026. Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka disusunlah program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto sebagai berikut:

1. Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)
2. Nilai IKM Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto yang akan dilaksanakan Tahun 2026 telah disusun dan dibahas dalam forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Mojokerto yaitu 4 Program dan 9 kegiatan dan 23 Sub Kegiatan dengan jumlah dana **Rp. 5.394.294.896,- (Lima Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah)** dari APBD Kabupaten dan DAK NF Bidang Perpustakaan, dengan rincian sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan yang mendukung dari penetapan program ini adalah sebagai berikut:

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terdiri dari Sub Kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terdiri dari Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d. Penyediaan Bahan/Material
 - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari Sub Kegiatan:
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya.

II. Program Pembinaan Perpustakaan

Kegiatan yang mendukung dari penetapan program ini adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari Sub Kegiatan :
 - a. Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.
 - b. Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan
 - c. Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - d. Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
2. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, yang terdiri dari Sub Kegiatan :
 - a. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial.

- b. Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
- c. Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca.
- d. Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat

III. Program Pengelolaan Arsip

Kegiatan yang mendukung dari penetapan program ini adalah sebagai berikut :

- 1. Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis
 - b. Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota
- 2. Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota
 - Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis

IV. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

Kegiatan yang mendukung dari penetapan program ini adalah sebagai berikut:

- 1. Pemusnahan Arsip Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun, yang terdiri dari Sub Kegiatan :
 - Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun.

Rencana program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 3.2
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2026
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN MOJOKERTO

NO	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	UP	BL	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	RUMUSAN TAHUN 2026						Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2027	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu indikatif
									APBD	APBD Prov	APBN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
1	2.23.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Disperka	83	4.399.294.896	APBD	-	-		83,20	4.404.294.896
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	Disperka	89%	4.019.900.000	APBD	-	-		90,5%	4.019.900.000
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Disperka	25 Orang/bulan	4.019.900.000	APBD	-	-		30 Orang/bulan	4.019.900.000
		Rincian :												
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						4.019.900.000						4.019.900.000
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	Disperka	90%	137.500.000	APBD	-	-		90%	137.500.000
	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Disperka	1 paket	75.000.000	APBD	-	-		1 paket	75.000.000
		Rincian :												
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (AC floor Standing, Laptop)						75.000.000						
	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Disperka	1 paket	15.000.000	APBD	-	-		1 paket	15.000.000
		Rincian :												
		Penyediaan makanan dan minuman						15.000.000						
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Disperka	1 paket	7.500.000	APBD	-	-		1 paket	7.500.000
		Rincian :												
		Biaya Foto copy dan penggandaan												
	2.23.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan Material			Jumlah paket Bahan material yang disediakan	Disperka	1 paket	25.000.000	APBD	-	-		1 paket	25.000.000
		Rincian :												
		Penyediaan alat tulis kantor												
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat	Disperka	30 laporan	15.000.000	APBD	-	-		25 laporan	15.000.000

				Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
		Rincian :												
		Perjalanan Dinas ASN/Rapat Konsultasi dan Koordinasi												
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan	Disperka	86%	156.194.896	APBD	-	-		86%	156.194.896
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Disperka	12 laporan	106.932.496	APBD	-	-		12 laporan	106.932.496
		Rincian :												
		Pembayaran rekening listrik & telepon						106.932.496						
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor yang disediakan	Disperka	12 laporan	49.262.400	APBD	-	-		12 laporan	49.262.400
		Rincian :												
		Penyediaan Jasa Tenaga Kerja (THL)						49.262.400						
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	Disperka	90%	85.700.000	APBD	-	-		90%	90.700.000
45	2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan lapangan			Jumlah kendaraan dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan Perizinannya	Disperka	10 unit	45.700.000	APBD	-	-		10 unit	50.700.000
		Rincian :												
		Biaya STNK, BBM, Suku Cadang												
	2.23.01.2.09.0010	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan lainnya			Jumlah Gedung kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Disperka	3 unit	20.000.000	APBD	-	-		3 unit	20.000.000
		Rincian :												
		Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan lainnya (Kantor Jabon, Sooko dan Mojosari)						20.000.000						
	2.23.01.2.09.0010	Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya			Jumlah Sarana Prasarana Gedung kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Disperka	1 unit	20.000.000	APBD	-	-		1 unit	20.000.000
		Rincian :												

		Pemeliharaan Sarana Prasarana Gedung Kantor/Bangunan lainnya (Servis Lift, Servis AC)					20.000.000							
2	2.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan			1. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Disperka	72,35	845.000.000	APBD	-	-			110.000.000
					2. Tingkat Kegemaran Membaca (TGM)		67,2							
	2.23.02	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Perpustakaan Daerah Kabupaten/Kota yang dikelola	Disperka	2 Perpustakaan	330.000.000	APBD	-	-			40.000.000
	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di seluruh wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standart Nasional Perpustakaan			Jumlah Perpustakaan pada satuan pendidikan dasar dan yang dilakukan pembinaan dalam mewujudkan Standart Nasional Perpustakaan	Disperka	75 Perpustakaan	15.000.000	APBD	-	-		50 Perpustakaan	20.000.000
		Rincian :												
		Pembinaan Perpustakaan Sekolah Tingkat Dasar (SDMI, SMP/MTs)												
	2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan			Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan	Disperka	1 Dokumen	112.500.000	-	-	DAK NF		1 Dokumen	20.000.000
		Rincian :												
		Pendataan Perpustakaan di Wilayah Kabupaten Mojokerto												
	2.23.02.2.01.0019	Pengembangan kekhasan koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	Disperka	20 Eksemplar	200.000.000	APBD	-	DAK NF		10 Eksemplar	20.000.000
		Rincian :												
		- Dokumentasi kekhasan Koleksi (Foto dipigora)												
	2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Perpustakaan Elektronik			Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK		1 Perpustakaan	2.500.000	-	-	DAK NF		1 Perpustakaan	20.000.000
		Rincian :												
		- Peningkatan Layanan Perpustakaan Elektronik												
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca	Disperka	75 kali	515.000.000	APBD	-	DAK NF		75 kali	70.000.000
	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial			Jumlah Perpustakaan Berbasis inklusi sosial di seluruh	Disperka	1 Perpustakaan	45.000.000	APBD	-	-		1 Perpustakaan	50.000.000

					wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan									
		Rincian :												
		- Pengembangan Bahan Pustaka												
		- Workshop Pustaka Terapan												
	2.23.02.2.02.0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-tempat Umum yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Sarana Perpustakaan yang dibangun dan dipelihara di Tempat-tempat Umum yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		1 Perpustakaan	35.000.000	APBD	-	DAK NF		1 Perpustakaan	50.000.000
		Rincian :												
		- Pembangunan Sarana Perpustakaan												
	2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca			Jumlah Orang yang mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten/Kota		600 Orang	245.000.000	-	-	DAK NF		600 Orang	50.000.000
		Rincian :												
		- Lomba Bertutur, Bimtek membaca Nyaring												
	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya baca dan Literasi pada satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat			Jumlah Locus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada satuan Pendidikan	Disperka	100 Locus	190.000.000	APBD	-	DAK NF		75 Lokasi	20.000.000
		Rincian :												
		Biaya Operasional Mobil Perpustakaan Keliling (MPK)/Mendukung KLA, TMMD												
	2.24.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				Disperka		150.000.000	APBD	-	-		Disperka	155.000.000
3	2.24.02	Program Pengelolaan Arsip			Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan Akuntabilitas Kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban Nasional	Disperka	100%	130.000.000	APBD	-	-		100%	135.000.000
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah PD yang sudah mengelola arsip dinamis sesuai aturan	Disperka	56 PD	50.000.000	APBD	-	-		56 PD	70.000.000
	2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan penyusutan Arsip Dinamis			Jumlah Naskah Dinas yang dilakukan Pemeliharaan dan penyusutan	Disperka	2000 berkas	30.000.000	APBD	-	-		2000 Berkas	50.000.000

		Rincian :												
		Biaya penyusutan arsip In aktif Perangkat Daerah					30.000.000							
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota			Jumlah laporan hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Disperka	1 laporan	20.000.000	APBD	-	-		1 laporan	20.000.000
		Rincian :												
		Monitoring dan evaluasi tata kelola kearsipan (56 OPD)					20.000.000							
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah PD yang sudah menyerahkan arsip statis ke Lembaga Kearsipan Daerah	Disperka	5 OPD	80.000.000	APBD	-	-		5 OPD	65.000.000
	2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, preservasi dan Akses Arsip Statis			Jumlah arsip statis yang dilakukan akuisisi, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Disperka	2000 Arsip	80.000.000	APBD				500 Arsip	65.000.000
		Rincian :												
		-Biaya Pemeliharaan, Perawatan dan Penggunaan Arsip Statis - Sosialisasi, Preservasi					80.000.000							
4	2.24.03	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip			Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan Berbangsa dan Bernegara untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Rakyat	Disperka	100%	20.000.000	APBD	-	-		100%	20.000.000
	2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip di lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota yang memiliki Retensi di bawah 10 (sepuluh) Tahun			Jumlah Arsip di lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota yang memiliki Retensi di bawah 10 (sepuluh) Tahun yang dilakukan Pemusnahan	Disperka	500 Arsip	20.000.000	APBD	-	-		3 peraturan	20.000.000
	2.24.03.2.01.0004	Penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki Retensi dibawah 10 (sepuluh) Tahun			Jumlah Arsip yang dilakukan penilaian, penetapan dan pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang memiliki Retensi dibawah 10 (Sepuluh) Tahun	Disperka	2000 Arsip	20.000.000	APBD	-	-		1000 Arsip	20.000.000
		Rincian :												
		Penilaian (Narasumber, Honor Tim, dll)												
JUMLAH TOTAL								5.394.294.896					4.669.294.896	

BAB IV

Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029.

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 dengan rencana program kegiatan serta pendanaan sebagai berikut :

TABEL 4.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2026
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN MOJOKERTO

NO	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	UP	BL	Indikator Kinerja		Target Capaian Kinerja	Lokasi	Kebutuhan dana	APBD	APBD Provinsi		USULAN APBN			Keterangan
					Output	Outcome					PD TERKAIT	PAGU (Rp)	KL	RP	D/TB/D AK	
1	2.23.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83	Disperka	4.399.294.896	APBD	-	-	-	-	-	
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	89%	Disperka	4.019.900.000	APBD	-	-	-	-	-	
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN		25 Orang/bulan	Disperka	4.019.900.000	APBD	-	-	-	-	-	
		Rincian :														
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							4.019.900.000							
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	90%	Disperka	137.500.000	APBD	-	-	-	-	-	
	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		1 paket	Disperka	75.000.000	APBD	-	-	-	-	-	
		Rincian :														
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							75.000.000							
	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan		1 paket	Disperka	15.000.000	APBD	-	-	-	-	-	
		Rincian :														
		Penyediaan makanan dan minuman							15.000.000							
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan		1 paket	Disperka	7.500.000	APBD	-	-	-	-	-	
		Rincian :														
		Biaya Foto copy dan penggandaan														
	2.23.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan Material			Jumlah paket Bahan material yang disediakan		1 paket	Disperka	25.000.000	APBD	-	-	-	-	-	

		Rincian :														
		Penyediaan alat tulis kantor														
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		25 laporan	Disperka	15.000.000	APBD	-	-	-	-	-	
		Rincian :														
		Perjalanan Dinas ASN/Rapat Konsultasi dan Koordinasi							15.000.000							
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan	86%	Disperka	156.194.896	APBD	-	-	-	-	-	
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan		12 laporan	Disperka	106.932.496	APBD	-	-	-	-	-	
		Rincian :														
		Pembayaran rekening listrik & telepon							106.932.496							
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor yang disediakan		12 laporan	Disperka	49.262.400	APBD	-	-	-	-	-	
		Rincian :														
		Penyediaan Jasa Tenaga Kerja (THL)							49.262.400							
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	90%	Disperka	85.700.000	APBD	-	-	-	-	-	
	2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan lapangan			Jumlah kendaraan dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan Perizinannya		10 unit	Disperka	45.700.000	APBD	-	-	-	-	-	
		Rincian :														
		Biaya STNK, BBM, Suku Cadang														
	2.23.01.2.09.0010	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan lainnya			Jumlah Gedung kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		3 unit	Disperka	20.000.000	APBD	-	-	-	-	-	
		Rincian :														

		Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan lainnya						20.000.000								
	2.23.01.2.09.0010	Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya			Jumlah Sarana Prasarana Gedung kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		1 unit	Disperka	20.000.000	APBD	-	-	-	-	-	
		Rincian :														
		Pemeliharaan Sarana Prasarana Gedung Kantor/Bangunan lainnya							20.000.000							
2	2.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan				1. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	72,35	Disperka	845.000.000	APBD	-	-	-	-	-	
						2. Indeks Kegemaran Membaca (TGM)	67,2									
	2.23.02	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikelola		2 Perpustakaan	Disperka	330.000.000	APBD	-	-	-	-	-	
	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di seluruh wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standart Nasional Perpustakaan			Jumlah Perpustakaan pada satuan pendidikan dasar dan yang dilakukan pembinaan dalam mewujudkan Standart Nasional Perpustakaan		50 Perpustakaan	Disperka	15.000.000	APBD	-	-	-	-	-	
		Rincian :														
		Pembinaan Perpustakaan Sekolah Tingkat Dasar (SDMI. SMP/MTs)														
1	2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan			Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan		1 Dokumen	Disperka	112.500.000	DAK NF	-	-	-	-	-	
		Rincian :														
		Pendataan Perpustakaan di Wilayah Kabupaten Mojokerto														
	2.23.02.2.01.0019	Pengembangan kekhasan koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan		20 Eksemplar	Disperka	200.000.000	APBD dan DAK NF	-	-	-	-	-	
		Rincian :														

		- Dokumentasi kekhasan Koleksi (Foto dipigora)														
	2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Perpustakaan Elektronik			Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK		1 Perpustakaan	Disperka	2.500.000	DAK NF	-	-	-	-	-	
		Rincian :														
		- Peningkatan Layanan Perpustakaan Elektronik														
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca		17 kali	Disperka	515.000.000	APBD	-	-	-	-	-	
	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial			Jumlah Perpustakaan Berbasis inklusi sosial di seluruh wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan		1 Perpustakaan	Disperka	45.000.000	APBD	-	-	-	-	-	
		Rincian :														
		- Pengembangan Bahan Pustaka														
		- Workshop Pustaka Terapan														
	2.23.02.2.02.0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-tempat Umum yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Sarana Perpustakaan yang dibangun dan dipelihara di Tempat-tempat Umum yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		1 Perpustakaan	Disperka	35.000.000	DAK NF	-	-	-	-	-	
		Rincian :														
		- Pembangunan Sarana Perpustakaan														
	2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca			Jumlah Orang yang mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten/Kota		600 Orang	Disperka	245.000.000	DAK NF	-	-	-	-	-	
		Rincian :														
		- Lomba Bertutur, Bimtek membaca Nyaring														
	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya baca dan Literasi pada satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat			Jumlah Locus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada satuan		100 Locus	Disperka	190.000.000	APBD & DAK NF	-	-	-	-	-	

					Pendidikan Dasar dan Masyarakat												
		Rincian :															
		Biaya Operasional Mobil Perpustakaan Keliling (MPK)/Mendukung KLA, TMMD															
		Lomba Bertutur Tingkat SD/MI															
	2.24.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					Disperka	150.000.000	APBD	-	-	-	-	-			
3	2.24.02	Program Pengelolaan Arsip				Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang sah dan pertanggungjawaban Nasional	100%	Disperka	130.000.000	APBD	-	-	-	-	-		
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota				Jumlah PD yang sudah mengelola arsip dinamis sesuai aturan	56 PD	Disperka	50.000.000	APBD	-	-	-	-	-		
	2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan penyusutan Arsip Dinamis			Jumlah Naskah Dinas yang dilakukan Pemeliharaan dan penyusutan		800 berkas	Disperka	30.000.000	APBD	-	-	-	-	-		
		Rincian :															
		Biaya penyusutan arsip In aktif Perangkat Daerah							30.000.000								
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota			Jumlah laporan hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota		1 laporan	Disperka	20.000.000	APBD	-	-	-	-	-		
		Rincian :															
		Monitoring dan evaluasi tata kelola kearsipan (56 OPD)							20.000.000								
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota				Jumlah PD yang sudah menyerahkan arsip statis ke Lembaga Kearsipan Daerah	5 OPD	Disperka	80.000.000	APBD	-	-	-	-	-		

	2.24.02.2.02.0002	Akuisisi, Pengolahan, preservasi dan Akses Arsip Statis			Jumlah arsip statis yang dilakukan akuisisi, Preservasi dan Akses Arsip Statis	500 Arsip	Disperka	80.000.000	APBD							
		Rincian :														
		-Biaya Pemeliharaan, Perawatan dan Penggunaan Arsip Statis														
		- Restorasi Arsip untuk Letter C														
4	2.24.03	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip				Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan Berbangsa dan Bernegara untuk kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Rakyat	100%	Disperka	20.000.000	APBD	-	-	-	-	-	
	2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip di lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota yang memiliki Retensi di bawah 10 (sepuluh) Tahun				Jumlah Arsip di lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota yang memiliki Retensi di bawah 10 (sepuluh) Tahun yang dimusnahkan	500 Arsip	Disperka	20.000.000	APBD	-	-	-	-	-	
	2.24.03.2.01.0001	Penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki Retensi dibawah 10 (sepuluh) Tahun			Jumlah Arsip yang dilakukan penilaian, penetapan dan pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang memiliki Retensi dibawah 10 (Sepuluh) Tahun	1000 Arsip	Disperka	20.000.000	APBD	-	-	-	-	-		
		Rincian :														
		Penilaian (Narasumber, Honor Tim, dll)														
JUMLAH TOTAL								5.394.294.896								

BAB V

PENUTUP

4.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Dalam pelaksanaan penyusunan Renja serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Disperka Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Disperka Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 ini harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program/ kegiatan yang dilaksanakan Disperka Kabupaten Mojokerto, baik dalam kerangka regulasi atau mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, antara kegiatan satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah (PD) serta pembagian urusan antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses musyawarah antar pelaku pembangunan dibawah lingkup Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto, agar program/ kegiatan menjadi terintegrasi, baik antar kegiatan, program maupun sektor.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 sebagai pedoman, landasan dan referensi dalam menyusun Rencana Strategik (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto. Sedangkan landasan operasional berupa dokumen perencanaan tahunan bagi Perangkat Daerah (PD) adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun action plan yaitu Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA PD) dalam rangka hal tersebut Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian sasaran program.

Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran (*budget intervention*), mensyaratkan pentingnya keterpaduan

dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu Badan/Instansi terkait, dengan tetap memperhatikan peran/ tanggungjawab/tugas yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah (PD), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, dapat dimanfaatkan antara lain melalui forum musyawarah koordinasi perencanaan, seperti Musrenbang di tingkat desa, Musrenbang Kecamatan di tingkat Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten di tingkat Kabupaten.

4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Perubahan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 sebagai berikut:

- a. Di dalam Penyusunan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 sangat memerlukan waktu yang cukup panjang, dikarenakan harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Perubahan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- b. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari P-APBD dengan harus memperhatikan/ mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada diatasnya diantaranya RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten Mojokerto, RPJMD Kabupaten Mojokerto, P-RKPD Kabupaten Mojokerto dan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto.

Bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto merupakan suatu proses perencanaan tahunan yang hendak dilaksanakan yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025–2029, Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025-2029, dan disesuaikan pula dengan kemampuan dukungan sumber daya dan dukungan dana yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

4.3. Rencana Tindak Lanjut

Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan antar bidang dan perangkat daerah, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berdaya guna dan berhasil guna. Dengan harapan Renja Disperka Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 ini dapat terealisasi dan dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin untuk mengemban visi dan misi yang ditetapkan dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Demikian Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto tahun 2026 disusun dan semoga dapat bermanfaat serta berguna untuk kepentingan pembangunan Kabupaten Mojokerto pada tahun 2026 yang akan dicapai.

Mojokerto, Agustus 2025
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan


Noorhono, S Sos, MM
Pembina Utama Muda/IVc
NIP 19721008 199201 1 001